



IMPLEMENTASI PROGRAM SIM NASIONAL PRESISI DI POLRES JOMBANG

WULAN SUCIANUR

Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana

Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286

Telp. : (031) 5041566, 5041536

Email: wulansucianur48@gmail.com

ABSTRACT

SINAR is a public policy that is implemented to provide convenience for the public in making a driving license because with the SINAR application, applicants can take care of a driving license from anywhere and anytime. The SINAR application is also intended to be a solution for areas that still practice extortion in the management of driving licenses. In other words, Sinar is a real action from the Police to solve administrative problems in the field of driving license making

Keywords: Policy, convenience, solution

ABSTRAK

SINAR merupakan kebijakan publik yang diimplementasikan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembuatan SIM karena dengan aplikasi SINAR pemohon dapat mengurus SIM dari mana saja dan kapan saja. Aplikasi SINAR juga dimaksudkan untuk menjadi solusi bagi daerah-daerah yang masih banyak melakukan praktik pungli dalam pengurusan SIM. Dengan kata lain, sinar merupakan aksi nyata dari Polri guna memecahkan permasalahan administratif di bidang pembuatan SIM.

Kata kunci: Kebijakan, kemudahan, solusi

PENDAHULUAN

Surat Ijin Mengemudi (SIM) adalah prasyarat untuk menjalankan atau mengoperasikan kendaraan bermotor dan berlaku selama lima tahun. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Untuk mendapatkan Surat Izin mengemudi seseorang harus memiliki kompetensi mengemudi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri, namun tetap harus melalui kepolisian dalam menerbitkan SIM tersebut.

Kesadaran masyarakat akan ketertiban lalu lintas juga bisa dilihat dari banyaknya pendaftar SIM di Polres Jombang, yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No.62, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang. Seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan pengguna jalan kebutuhan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) juga meningkat.

Apabila terhitung bulan Juli 2018, jumlah kendaraan bermotor di Jombang sebanyak 628.273 yang terdiri dari 575.855 sepeda motor atau kendaraan roda dua, 34.931 mobil penumpang, 16.516 mobil barang, 920 mobil bis, dan 51 angkutan alat-alat berat.

Dari jumlah banyaknya penambahan kendaraan diatas, secara tidak langsung pemohon untuk pembuatan SIM juga meningkat, namun melihat dari pemenuhan standar ruang pelayanan SIM Polres Jombang masih belum optimal, dan dinilai perlu adanya pembenahan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Dwiyanto, menjelaskan bahwa pelayanan di Indonesia masih buruk dan belum mampu untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang efisien, adil, responsif dan akuntabel. Salah satu pelayanan yang masih dianggap buruk adalah pada pelayanan pembuatan SIM. Salah satu pimpinan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebutkan bahwa terdapat tiga lembaga pelayanan yang terburuk dalam memberikan pelayanan publik yaitu Kepolisian, Badan Pertahanan Nasional dan Kepegawaian. Selanjutnya, disebutkan bahwa pengaduan masyarakat yang paling menonjol terhadap pelayanan kepolisian adalah pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM)¹.

Pada pelaksanaan pelayanan SIM di Jombang juga masih ditemukan beberapa kendala yaitu pada pelaksanaan SIM online jaringan internet terkadang yang masih belum stabil karena adanya modul dari *core switch* yang sedang mengalami kerusakan, karena ini program baru. Juga perangkatnya seperti komputer dan lainnya. Dengan kendala di *core switch* maka seluruh aplikasi sim online, tidak berfungsi. Dampak dari kendala tersebut adalah pelayanan SIM online di wilayah tidak bisa digelar.

Untuk saat ini masyarakat masih belum memahami tata cara atau alur pelayanan SIM Nasional Presisi, yang secara keseluruhan telah dilayani secara online, namun masih harus melakukan tahapan psikotes dan tes kesehatan secara online melalui program e-PPsi SIM (psikotes) dan e-Rikkes (tes kesehatan), sehingga masih dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut pada SIM Nasional Presisi itu sendiri. Seyogianya, adanya transformasi Presisi dinilai dapat menutup kendala-kendala dalam pelayanan SIM di Indonesia, khususnya juga di Polres Jombang.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan². Dalam pendekatan kualitatif, teori digunakan sebagai harapan untuk menemukan sebuah teori yang didasarkan pada informasi dari informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Impelementasi Kebijakan Program Sim Nasional Presisi Di Polres Jombang

Institusi kepolisian pada semua tingkatan di seluruh kewilayahan harus mengikuti petunjuk pemerintah pusat maupun daerah setempat dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila SINAR merupakan program Kapolri untuk merespon kebijakan pemerintah terkait reformasi birokrasi dalam hal pemberian pelayanan administrasi kepada publik. Kinerja Polri

¹ Juwita, A. Optimalisasi SIM Online Sebagai Strategi Untuk Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Kantor Satpas Jember. *Airlangga Development Journal*, 91-117. 2018.

² Creswell, J. W. Mapping the developing landscape of mixed methods research. *SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*, 2, 45-68. 2010.

dalam bidang pelayanan publik di atas, mengindikasikan bahwa kinerja pelayanan publik Polri masih belum sepenuhnya memberi kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan sebagaimana yang diharapkan dalam pembangunan zona integritas.

Dalam perspektif studi kebijakan publik, jika sebuah kebijakan belum memberi perubahan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan kebijakan, ini berarti ada persoalan dalam implementasi kebijakan tersebut. Sejatinya implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Patton dan Sawicki yang dikutip Agustino menjelaskan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini implementaor mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Kegiatan mengorganisir tersebut menyebabkan implementator dapat mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan³.

Salah satu pelayanan publik di bidang lalu lintas adalah pengadaan Surat Izin Mnegemudi (SIM) oleh Korlantas Polri. Dalam Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Siapapun yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan dan tidak memiliki SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) tersebut maka akan dikenai pidana berupa kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah. Walaupun begitu, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki SIM pada saat berkendara. Padahal SIM merupakan bukti bahwa seseorang memiliki skill berkendara yang baik serta mampu menaati aturan lalu lintas dan memiliki etika berkendara di jalan.

Sejalan dengan adanya reformasi birokrasi yang bergulir dan program Promoter Polri yang kemudian dilanjutkan dengan program PRESISI, lebih khusus pada aspek *Modern* dimana layanan polri telah didukung teknologi-teknologi canggih maka Koorlantas Polri meluncurkan aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR)

Menurut Grindle dalam dunn⁴ terdapat beberapa indikator dalam isi kebijakan yang terdiri atas:

- a) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi),
Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut. Pernyataan tersebut sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Wikha Ardilestanto⁵ yang menyebutkan bahwa calo dan pungli merupakan permasalahan dalam pengurusan SIM. Dengan adanya praktik calo di lingkungan Satpas tersebut kemudian menghilangkan esensi dan tujuan dari SIM itu sendiri yang awalnya merupakan bukti kompetensi dari seorang pengemudi. Praktik calo tersebut menjadikan seseorang dapat memiliki SIM tanpa melalui proses ujian teori dan praktik. Akibatnya, meskipun banyak pengemudi yang memiliki SIM namun tidak

³ Agustino, Leo. *Politik Dan Kebijakan Publik*, Aipi Bandung : Puslit Kp2w Lemlit Unpad. 2008.

⁴ Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University. 2003.

⁵ Ardilestanto, Wikha. *Kebijakan One-Gate System Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas Di Satpas Gresik*. *Jurnal Sosiologi Dialektika*. Vol. 15, No. 2, 91-100. 2020.

memiliki kompetensi maupun kualitas dari seorang pengemudi kendaraan. Hal ini kemudian menjadi fatal ketika banyak terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh ketidakpahaman pengemudi terkait peraturan lalu lintas itu sendiri. Dengan demikian praktik calo dalam proses pembuatan SIM di Satpas ini harus segera ditangani karena merupakan bagian dari kurangnya kualitas pelayanan itu sendiri. Implementasi SINAR berdasarkan indikator Kepentingan yang Mempengaruhi benar-benar berdasarkan kepentingan publik. Tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan aplikasi ini karena telah disebutkan di atas, semua proses dilakukan sendiri oleh Pemohon (pengguna aplikasi). Satu aplikasi untuk satu nomor ponsel dengan prosedur yang tidak berkepanjangan atau memakan banyak waktu. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Harbani Pasalong bahwa untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan publik, kepentingan yang harus diangkat adalah kepentingan publik. Semua kepentingan publik tersebut salah satunya harus mengoptimalkan prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

b) *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

Keuntungan/manfaat dari program SINAR ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal pengurusan SIM. Selain itu, aplikasi ini dibuat untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik Polri sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0 melalui berbagai inovasi pelayanan. Inovasi adalah proses pembaharuan atau pengembangan dengan menciptakan suatu hal baru yang berbeda dari sebelumnya. Inovasi juga bisa diartikan penemuan baru dalam teknologi atau kemampuan dalam memperkenalkan sebuah temuan baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya.

c) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang diinginkan),

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of Policy* yang ingin dijelaskan pada pola ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

Pada pelaksanaan SINAR sendiri skala keberhasilan yang diinginkan adalah peningkatan penerbitan SIM sebelum dan sesudah launching aplikasi.

Secara keseluruhan terdapat peningkatan produksi SIM dari sebelum launching dibandingkan dengan sesudah launching aplikasi SINAR sebanyak 9834 penerbitan atau sekitar 75,93%.

SINAR mampu meningkatkan animo masyarakat dalam melakukan pengurusan SIM. SINAR yang diluncurkan pada masa pandemi Covid-19 dinilai cocok dan merupakan win-win solution bagi masyarakat untuk tetap patuh pada aturan Pemerintah, sekaligus mendapatkan kebutuhan mereka akan penerbitan SIM.

Selain peningkatan permohonan SIM, derajat perubahan yang hendak dicapai dalam peluncuran program ini adalah memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat di era digital. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa SINAR dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang cenderung

enggan berurusan secara langsung dengan lembaga birokratif karena dinilai terlalu merepotkan dan membuang-buang waktu.

d) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam hal aplikasi SINAR, banyak keputusan yang dipertimbangkan oleh Kapolri. Selain mengikuti perkembangan revolusi industri guna mewujudkan smart police 4.0, SINAR diluncurkan karena Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Jarak tempuh antara satu wilayah ke wilayah lain tidaklah sama. Terlebih lagi, sebagaimana dijelaskan di muka bahwa masing-masing individu memiliki kesibukan yang beragam, sehingga diperlukan waktu khusus untuk melakukan pengurusan SIM di kantor SATPAS. Kondisi jarak tempuh tersebut juga menjadi pertimbangan bagi Polri untuk meluncurkan aplikasi SINAR. Pada wilayah hukum Polres Jombang misalnya, ambil contoh untuk kecamatan Wonosalam, dengan jarak sekitar 30 km ke Ibukota Kabupaten (Jombang Kota), tentu diperlukan waktu khusus bagi pemohon dalam mengurus SIM. Waktu luang yang paling logis bagi masyarakat adalah hari Minggu, sementara kantor Satpas hanya buka pada hari Senin hingga Sabtu. Dengan kendala tersebut maka SINAR adalah solusi yang tepat, supaya masyarakat dapat melakukan pengurusan SIM tanpa harus datang ke kantor SATPAS.

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal efisiensi waktu, dengan adanya SINAR maka diharapkan masyarakat lebih menilai Polri secara positif dalam konteks pelayanan publik. Seiring dengan perkembangan administrasi publik, inovasi pelayanan publik memegang peran yang sangat penting. Inovasi pelayanan publik merupakan sebuah jawaban terhadap tuntutan masyarakat, perkembangan teknologi dan perkembangan globalisasi yang terus bergerak. Inovasi dipandang sebagai penentu dan kunci kesuksesan jangka panjang pada era digital saat ini.

e) *Program Implementer* (pelaksana program)

Didalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Indikator ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik sebelum pelaksanaan program kebijakan.

Implementasi program SINAR sudah dirancang secara komprehensif, termasuk aspek SDM pelaksana. Sebagaimana kajian yang dilakukan di wilayah Polda Sulawesi Utara yang menyebutkan bahwa modernisasi dalam tubuh Polri berdampak positif bagi kompetensi SDM Polri karena mau tidak mau semua personel Polri wajib memiliki kompetensi yang baik di bidang IT supaya dapat mengoperasikan sarana dan prasarana kerja yang modern.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Sim Nasional Presisi Di Polres Jombang.

1. Faktor Penghambat Implementasi Program SINAR Di Polres Jombang

Pelaksanaan sebuah program kebijakan pasti dihadapkan pada berbagai faktor, baik yang mendukung jalannya pelaksanaan kebijakan maupun faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program tersebut. Merujuk pada konsep faktor-faktor

implementasi program yang telah dipaparkan oleh Charles O. Jones⁶ maka faktor-faktor penghambat pada pelaksanaan program SINAR di Polres Jombang meliputi:

a) Sumber Daya,

Faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai salah satu faktor kritis dari implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi staf dengan ukuran cukup, dan memiliki keterampilan yang sesuai untuk penyelesaian tugas mereka, otoritas, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi fungsi pemerintahan. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya Sumber Daya Manusia, terbatasnya dana atau fasilitas dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. SDM merupakan faktor yang menguntungkan bagi keberhasilan program SINAR. Hasil tersebut sebagaimana penelitian yang dilakukan di Polres Banyumas pada implementasi program e-tilang bahwa SDM yang berkualitas dan mampu mengoperasikan peralatan yang sifatnya digital merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik di era modern⁷.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai salah satu faktor kritis dari implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi staf dengan kategori jumlah yang cukup, dan memiliki keterampilan yang sesuai untuk penyelesaian tugas mereka, otoritas, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis merupakan fungsi dari pemerintahan. Sumber daya kebijakan ini harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya kuantitas sumber daya manusia, terbatasnya dana atau fasilitas dalam implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

b) Efektivitas Aplikasi

Merujuk pada pernyataan wawancara dengan informan dapat dipastikan bahwa implementasi SINAR sudah dapat diterima oleh masyarakat karena memberikan kemudahan bagi khalayak dalam proses kepemilikan SIM. Walaupun begitu terdapat aspek yang perlu dievaluasi karena dapat menjadi faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan SINAR di kemudian hari. Berdasarkan hasil wawancara di atas dikemukakan bahwa masyarakat kurang puas dengan sistem pengiriman SIM fisik yang dilakukan melalui PT Pos Indonesia karena dinilai terlalu lambat. Jadi dari sisi pengiriman SIM fisik yang hanya dilakukan melalui satu jenis jasa ekspedisi dapat dikatakan sebagai faktor yang menghambat pelaksanaan program, sehingga diperlukan evaluasi oleh pihak yang berkepentingan

2. Faktor Pendukung Implementasi Program SINAR Di Polres Jombang

Merujuk pada konsep faktor-faktor implementasi program yang telah dipaparkan oleh Charles O. Jones maka faktor yang dimaksudkan mendukung pelaksanaan program SINAR di Polres Jombang meliputi tiga aktifitas utama, yaitu:

1) Organisasi

⁶ Jones, Charles O. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.

⁷ Arjuna, Yoga Dwi. Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Advances In Police Science Research Journal*, 4(1), January 2020. 49-90

Keberhasilan implementasi Charles O. Jones harus ada organisasi atau Lembaga yang melaksanakan. Jones⁸ mengatakan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan atau penataan Kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Bagi Jones⁹ organisasi birokrasi berkaitan dengan (a) pembentukan atau penataan kembali sumber daya, (b) unit-unit, serta (c) metode untuk menjadikan program berjalan. Dengan demikian ketiga aspek ini akan dibahas sebagai berikut:

a) Sumber Daya,

Ditegaskan bahwa SDM di Polres Jombang telah memiliki kualitas yang memadai, terutama dalam memberikan pelayanan SIM secara digital kepada masyarakat. Selain SDM, sarana dan prasarana di Polres Jombang juga mendapatkan penilaian positif dari masyarakat. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai ini tentu menjadi faktor yang dapat mendukung optimalnya implementasi program SINAR di wilayah hukum Polres Jombang. Karena dengan sarana dan prasara yang berkualitas, pelaksanaan pelayanan tidak akan terkendala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Arjuna¹⁰ dalam penelitiannya bahwa faktor yang mendukung pelaksanaan E-Tilang adalah peralatan yang canggih. Tidak hanya *hardware*, tetapi juga ketersediaan *software* seperti sistem jaringan internet.

Jadi sumber daya manusia yang memadai dan ketersediaan peralatan modern yang memadai secara kualitas merupakan faktor yang dapat mendukung pelaksanaan program SINAR di Polres Jombang.

b) Unit-unit atau Struktur Organisasi.

Secara keseluruhan dapat ditegaskan bahwa struktur organisasi di Polres Jombang sudah sesuai SOP Polri. Tidak ada tumpang tindih jabatan atau wewenang. Semua tugas dan kewajiban anggota, khususnya dalam pelaksanaan SINAR, sudah berjalan tanpa menimbulkan konflik internal. Kondisi yang dijabarkan tersebut menunjukkan bahwa arus komunikasi dan struktur organisasi di Polres Jombang telah berjalan baik. Kondisi tersebut mendukung jalannya sebuah implementasi kebijakan publik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sari¹¹, dkk bahwa struktur organisasi yang jelas tidak akan memunculkan kesalahpahaman tugas dan wewenang, sehingga implementasi kebijakan bagi masyarakat dapat berjalan optimal. Lebih lanjut lagi disebutkan bahwa sistem komunikasi pada sebuah organisasi haruslah terintegrasi, supaya tidak ada kondisi yang disebut *miss communication*.

c) Metode.

Metode dapat diartikan sebagai serangkaian proses kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan bagi keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi. Pada sebuah penelitian

⁸ Jones, Charles O. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Arjuna, Yoga Dwi. Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Advances In Police Science Research Journal*, 4(1), 49-90. January 2020.

¹¹ Sari, Ratna Puspita Dan Amy Yayuk Sri Rahayu. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. *Perspektif*, 10 (1) : 230-238. 2021.

disebutkan bahwa metode dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus mengikuti perubahan lingkungan strategis, salah satunya adalah perkembangan teknologi dan sistem informasi¹².

Polri telah melakukan upaya yang bersesuaian dengan kondisi perkembangan global. Saat ini kuantitas masyarakat yang menggunakan media sosial sangat banyak. Salah satu lembaga survey menyebutkan bahwa media sosial merupakan aktivitas 90% yang dilakukan oleh masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan internet. Artinya hampir semua pengguna internet di Indonesia memiliki kegiatan melalui media sosial.

Polres Jombang melakukan strategi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi berupa media sosial untuk mengoptimalkan pelaksanaan program SINAR. Upaya penyebaran informasi tersebut masih dilakukan dan akan terus dilakukan hingga tidak ada lagi masyarakat yang datang ke SATPAS untuk melakukan pengurusan SIM. Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa pemanfaatan media sosial dalam menyebarkan informasi terkait SINAR merupakan faktor yang mendukung implementasi SINAR di Polres Jombang.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai salah satu faktor kritis dari implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi staf dengan kategori jumlah yang cukup, dan memiliki keterampilan yang sesuai untuk penyelesaian tugas mereka, otoritas, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis merupakan fungsi dari pemerintahan. Sumber daya kebijakan ini harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan.

2) Interpretasi

SINAR merupakan salah satu kebijakan Kapolri untuk menciptakan institusi Polri yang PRESISI yang sejalan dengan perkembangan arus revolusi industri 4.0. Dengan demikian, semua anggota Polri diharapkan memiliki pandangan yang serupa, bahwa di era ini kepolisian juga harus berbenah menjadi institusi yang canggih dan modern. Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan dalam semua bidang termasuk instansi kepolisian. Modernisasi juga dilakukan dalam hal pelayanan administrasi yang berkaitan dengan sistem kepolisian. Salah satunya adalah pelayanan SIM. Oleh karena itulah lahir aplikasi SINAR.

Pada dasarnya semua personel Polri memahami fungsi dan pengaplikasian SINAR sebagai pelayanan pembuatan SIM, baik itu atasan maupun personel anggota.

Berbagai pernyataan positif dari masyarakat saat ini dapat dijadikan sebuah indikator bahwa petugas telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Artinya tidak ada salah pemahaman atau salah interpretasi dari petugas yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan program SINAR sebagai salah satu kebijakan Polri di bidang Lantas.

3) Aplikasi

Pada penelitian ini sendiri, aspek aplikasi diwujudkan dengan dibuatnya sebuah sistem operasi yang berbasis web (jaringan) dan smartphone dalam bentuk aplikasi mobile SINAR. Pada zaman yang serba digital ini, konsep aplikasi berbasis smartphone tentu merupakan upaya yang bijak dalam menarik minat masyarakat.

¹² Sari, Ratna Puspita Dan Amy Yayuk Sri Rahayu. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. *Perspektif*, 10 (1) : 230-238. 2021.

Terbukti, dengan adanya aplikasi SINAR yang diluncurkan oleh Polri pada pertengahan 2021, permohonan pembuatan SIM secara online semakin meningkat.

SINAR memberikan kemudahan dalam hal pelayanan SIM kepada masyarakat, sehingga merupakan faktor yang dapat mendukung dalam pelayanan administrasi publik yang dalam hal ini adalah penerbitan SIM.

Ponto menyebutkan bahwa pada setiap implementasi program harus mengukur kesiapan sumber daya, interpretasi dan aplikasinya, hal ini dapat menentukan langkah selanjutnya yang lebih efektif dan efisien. Dari hasil analisis pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang berpengaruh dalam pelaksanaan SINAR di Polres Jombang. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan SINAR meliputi (1) Kualitas SDM dan Sarana Prasarana yang memadai, (2) Pemanfaatan media sosial sebagai strategi informatif, (3) Struktur organisasi yang jelas, (4) Pemahaman yang sangat baik dari petugas tentang aplikasi SINAR, serta (5) Aplikasi yang mudah digunakan sesuai kebutuhan masyarakat milenial. Sementara faktor yang dapat menghambat pelaksanaan SINAR adalah (1) Terbatasnya anggaran, serta (2) tidak adanya pilihan jasa ekspedisi untuk pengiriman SIM fisik ke alamat Pemohon.

Kondisi tersebut sesuai dengan sebuah riset yang dilakukan di Nigeria bahwa pada sebuah implementasi kebijakan publik yang dilakukan oleh birokrasi, pasti memiliki faktor yang mendorong serta berbagai kendala¹³ (Chukwuemeka. 2013). Faktor yang mendorong keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik adalah komunikasi, kompetensi pelaksana dan adanya sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan. Sementara kendala yang kerap kali muncul dalam praktik implementasi kebijakan publik adalah tidak adanya dukungan dari sisi anggaran ataupun dukungan moral pada pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut maka diharapkan adanya evaluasi dari pemangku kepentingan untuk terus mengeksplorasi pelayanan SIM Nasional Presisi supaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. SINAR merupakan kebijakan publik yang diimplementasikan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembuatan SIM karena dengan aplikasi SINAR pemohon dapat mengurus SIM dari mana saja dan kapan saja. Aplikasi SINAR juga dimaksudkan untuk menjadi solusi bagi daerah-daerah yang masih banyak melakukan praktik pungli dalam pengurusan SIM. Dengan kata lain, SINAR merupakan aksi nyata dari Polri guna memecahkan permasalahan administratif di bidang pembuatan SIM. Melalui hasil ini dapat diketahui bahwa Polres Jombang, khususnya Satlantas Polres Jombang berada pada kondisi yang kondusif, sehingga arus informasi dari pimpinan puncak dapat tersampaikan pada semua anggota. Selain itu, berbagai upaya melalui pemanfaatan perkembangan teknologi digunakan sebagai strategi untuk menyebarluaskan informasi terkait adanya pelayanan SIM Nasional Presisi kepada masyarakat Jombang, yaitu dengan menginformasikan melalui media sosial, pemasangan banner, serta iklan di stasiun

¹³ Chukwuemeka, O. Environmental Influence on Academic Performance of Secondary School Students in Port Harcourt Local Government Area of Rivers State. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4 (12): 34-39. 2013.

radio yang mengudara di wilayah Jombang. Kepatuhan aparat Polres Jombang dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi sebagai suatu kekuatan dalam memberikan pelayanan publik. Kepatuhan ini tercermin dari sikap aparat yang tidak mudah terpengaruh atas suatu tindakan yang dilarang dalam pemberian pelayanan SIM. Kepatuhan ini dilakukan dalam rangka menghindari segala bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta menciptakan komitmen dari semua anggota untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekaligus menjaga citra positif institusi Polri. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Implementasi SINAR di Polres Jombang sudah berjalan dengan baik.

2. Dalam pelaksanaan pelayanan SIM digital melalui aplikasi SINAR ditemukan beberapa faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan pelayanan SIM digital di Polres Jombang. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan SINAR meliputi (1) Kualitas SDM dan Sarana Prasarana yang memadai, (2) Pemanfaatan media sosial sebagai strategi informatif, (3) Struktur organisasi yang jelas, (4) Pemahaman yang sangat baik dari petugas tentang aplikasi SINAR, serta (5) Aplikasi yang mudah digunakan sesuai kebutuhan masyarakat milenial. Sementara faktor yang dapat menghambat pelaksanaan SINAR adalah (1) Terbatasnya anggaran, serta (2) tidak adanya pilihan jasa ekspedisi untuk pengiriman SIM fisik ke alamat Pemohon.

Saran

Merujuk pada simpulan di atas maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pelaksanaan program SINAR hendaknya dapat disusun dan ditetapkan sebagai SOP yang berlaku umum untuk seluruh wilayah Polda melalui kebijakan yang dikeluarkan setingkat Kapolri, terutama dalam hal strategi peningkatan pengguna aplikasi SINAR.
2. Perlu ditetapkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perlu dilakukan pencatatan terkait dengan keluar masuknya dana pada implementasi program SINAR, karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak semua kegiatan dalam program SINAR dapat didukung penuh dengan anggaran yang ada. Selain itu perlu adanya upaya pengintegrasian data permohonan pengajuan SIM melalui aplikasi SINAR dengan PT POS Indonesia supaya tidak ada keterlambatan pengiriman SIM Fisik. Selain itu kedepannya diharapkan Polri menjalin kerjasama dengan jasa ekspedisi lain yang ada di Indonesia supaya masyarakat dapat memilih jasa ekspedisi yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. *Politik Dan Kebijakan Publik*, Aipi Bandung : Puslit Kp2w Lemlit Unpad. 2008.
- Angrayni, L., & Yusliati. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2018.
- Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University. 2003.

- Jones, Charles O. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.
- Mardjono, R. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum UI. 2004.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. 2012.
- Robbins, Stephen P. *Teori Organisasi: Konsep, Struktur, Proses*. Jakarta: Penerbit Arcan. 1994.
- Rogers, Everett M. *Diffusion Of Innovations*, Free Press, London. 1983.
- Semiawan, C. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grafindo. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Refika Aditama. 2006.
- Suparlan, P. *Membantun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2007.
- Surendeng, J., Lumolos, J., & Kimbal, M. Kinerja Pelayanan Prima di Kesatuan Polisi Resor Minahasa. *Jurnal PSP Pascasarjana Unsrat*. 2016.

Jurnal

- Adikara, L. C. The Influence of Driving License Registration Quality Service Toward Applicant Satisfaction in Satpas Resort Police of Nganjuk. *RJOAS*, 7(79), July, 221-229. 2018.
- Ahmed, Iyanda Kamoru dan Bello Sanusi Dantata. Problems and Challenges of Policy Implementation for National Development. *Research on Humanities and Social Sciences*. Vol.6, No.15, 60-65. 2016.
- Ardilestanto, Wikha. Kebijakan *One-Gate System* Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas Di Satpas Gresik. *Jurnal Sosiologi Dialektika*. Vol. 15, No. 2, 91-100. 2020.
- Arjuna, Yoga Dwi. Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Advances In Police Science Research Journal*, 4(1), 49-90. January 2020.
- Chukwuemeka, O. Environmental Influence on Academic Performance of Secondary School Students in Port Harcourt Local Government Area of Rivers State. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4 (12): 34-39. 2013.
- Creswell, J. W. Mapping the developing landscape of mixed methods research. *SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*, 2, 45-68. 2010.
- Djaelangara, R. Tinjauan Kritis Konsep dan Implementasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal FISIP UNTAD*, 273-288. 2010.

- Fatimah, S. Efektivitas Sistem Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Secara Online di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Colombo Surabaya. *Jurnal Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 600-613. 2017.
- Hambali B. Perspektif Pungutan Liar Pada Pelayanan Ssb. *Jurnal Litbang Polri* 22 (2). 75-133. 2019.
- Hayati, N., & Putri, N. E. Hubungan Efektivitas Program Layanan SIM Online dengan Kepuasan Masyarakat di Polresta Padang. *Ensiklopedia Social Review, Vol. 2 No.3*, 256-261. Oktober, 2020.
- Ibrahim, A. H., Husain, T., Handji, S. B., & Suhu, B. L. The Effectiveness of Driving License Services in Police Station Traffic Unit. *International Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 4 No. 3*, 107-113. December 2020.
- Juwita, A. Optimalisasi SIM Online Sebagai Strategi Untuk Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Kantor Satpas Jember. *Airlangga Development Journal*, 91-117. 2018.
- Nuriyanto. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"? *Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September*, 429-453. 2014.
- Pasolong, Harbani. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung. 2010.
- Permini, N. L. Analisis Efektivitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Polres Karangasem. *Jurnal Cakrawarti, Vol.02, No. 01, Feb-Jul*, 5-12. 2019.
- Rendro. *Beyond Borders: Communication Modernity & History The First LSPR Communication Research Conference 2010*. London: STIKOM The London School of Public Relations. 2010.
- Sari, Ratna Puspita Dan Amy Yayuk Sri Rahayu. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. *Perspektif*, 10 (1): 230-238. 2021.
- Sebastian, Aron. Inovasi Pelayanan Sim Booking Di Satlantas Polres Kudus. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (Dialogue)*. Vol 1, Nomor 2, 1-13. Desember 2019.
- Setiawan, D., Murti, I., & Kusbandrijo, B. Efektivitas Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satpas Polresta Sidoarjo. *Jurnal Administrasu Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1-20. 2019.
- Suandi. Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan, Volume 1 Nomor 2 Edisi Maret* , 13-22. 2019.
- Supit, Mercy Ivana, Christoffel Kojo, Dan Irvan Trang. Analisis Implementasi Kebijakan Dan Perubahan Organisasi Terhadap Produktivitas Pegawai Di Instansi Polda Sulut. *Jurnal Emba Vol.7 No.8*, 3349 – 3358. Juli 2019.